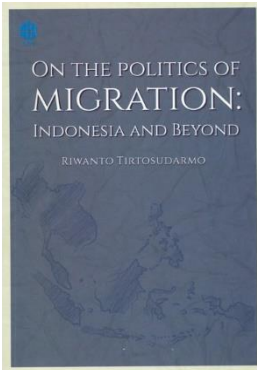


1969–2015: CERITA TIGA DEKADE POLITIK PERPINDAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Anggy Denok Sukmawati

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
bluedandelion23@gmail.com



Judul : *On The Politics of Migration: Indonesia and Beyond*
Penulis : Riwanto Tirtosudarmo
Tahun Terbit : 2015
Tebal : xxxix + 361 halaman
Penerbit : LIPI Press

Pengantar

Penulis adalah seorang peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, dan merupakan pionir dalam kajian politik migrasi di Indonesia. Kajian ini merupakan kajian multidisipliner yang melihat fenomena migrasi penduduk di Indonesia dengan memper- timbangkan faktor politik sebagai latar belakangnya. Selama ini, migrasi penduduk dilihat sebagai usaha untuk meratakan jumlah penduduk di Indonesia dengan mempertimbangkan sisi ekonomi. Namun, penulis melihat bahwa migrasi penduduk tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi saja. Penulis melihat bahwa faktor politik juga merupakan salah satu pendorong terjadinya migrasi penduduk di Indonesia. Faktor politik tersebut berkaitan erat dengan Orde Baru yang mencetuskan pelaksanaan program transmigrasi penduduk Indonesia.

Selain melihat fenomena migrasi penduduk pada era Orde Baru, penulis juga melihat efek samping dari migrasi penduduk tersebut, terutama setelah era Orde Baru runtuh. Terdapat beberapa masalah yang muncul dari migrasi penduduk tersebut, yaitu munculnya konflik antara penduduk migran dengan penduduk lokal di daerah tujuan transmigrasi, adanya desentralisasi kekuasaan, serta gagalnya pembentukan konsep “negara kesatuan”. Masalah-masalah tersebut dibahas

dalam bagian pertama buku ini. Selanjutnya, bagian kedua buku ini memaparkan contoh-contoh kasus migrasi beberapa suku Indonesia ke negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Jepang, serta memaparkan masalah-masalah yang timbul seputar perpindahan penduduk antarnegara, khususnya di Asia Tenggara.

Politik Pemerataan Penduduk

Program transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru merupakan usaha pemerintah dalam meratakan jumlah penduduk Indonesia yang dirasa kurang sama persebarannya. Pemerintah melihat terlalu banyak orang yang tinggal di Pulau Jawa, sedangkan pulau-pulau lain di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terhitung “sedikit”. Hal itu menyebabkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi dan tingkat ekonominya rendah. Menanggapi hal itu, pemerintah kemudian memindahkan masyarakat desa-desa di Pulau Jawa ke pulau lain. Pulau utama tujuan transmigrasi adalah Pulau Sumatra, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Jika dilihat sekilas, program transmigrasi tersebut memiliki alasan dan tujuan yang masuk akal. Namun, sebenarnya, transmigrasi memiliki agenda dan tujuan lain di baliknya. Hal inilah yang disampaikan oleh penulis dalam bab 1 buku ini “*Tansmigration as Ideological Policy*”.

Disebutkan dalam bab ini, kebijakan pembangunan di Indonesia selalu dipengaruhi oleh hubungan dinamis antara pusat (Pulau Jawa atau Jakarta) dan pinggiran (daerah atau pulau selain Jawa). Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan Pulau Jawa sebagai pulau yang paling banyak penduduknya, yang memiliki beragam budaya. Selain jumlahnya yang banyak, suku Jawa selalu menjadi kelompok budaya yang paling dominan dan paling berpengaruh. Penulis mengutip pendapat Bruner (1974: 252) yang menyebutkan bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa selalu menganggap transmigrasi sebagai proses “Jawanisasi”, serta “Islamisasi”, dan “Penjajahan Internal”, khususnya di Irian Jaya.

Pada bab ini, penulis secara singkat memberikan paparan mengenai transmigrasi dari mulai awal dicetuskannya pada tahun 1969/1970 – 1973/1974 hingga masa-masa kemunduran dan kegagalannya pada tahun 1993/1994 – 1996/1997. Poin-poin utama dari program transmigrasi yang dibahas dalam bab ini meliputi dana transmigrasi, friksi yang muncul selama program transmigrasi tersebut dilaksanakan, baik dalam Kementerian Transmigrasi maupun di dalam pemerintahan secara umum, hasil yang dicapai oleh program transmigrasi dari periode ke periode, serta masalah yang muncul karena proses transmigrasi tersebut.

Penulis terutama menyoroiti masalah yang muncul selama pelaksanaan transmigrasi, baik masalah pada pemerintahan maupun pada masyarakat Indonesia. Masalah yang muncul terdiri dari masalah internal dan eksternal. Masalah internal yang muncul berkaitan dengan pengaturan antardepartemen dalam pemerintahan, terutama masalah yang berkaitan dengan pengaturan dana tak terpakai yang menunjukkan ketidakefisienan penerapan rencana. Hal itu diperburuk dengan suramnya prospek harga minyak dunia. Masalah tersebut mulai terasa pada tahun kedua Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV pada tahun 1985. Sementara itu, masalah eksternal berkaitan dengan munculnya kritik dari negara-negara luar, terutama berkaitan dengan perusakan hutan dalam upaya pembukaan lahan pertanian bagi para transmigran serta perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat asli di daerah tujuan transmigrasi.

Untuk mengatasi kedua masalah tersebut, Kementerian Transmigrasi membentuk tim penasihat yang diharapkan bisa membantu mencari jawaban atas masalah-masalah yang ada. Tim tersebut menyelesaikan laporannya pada tahun 1985 dan menyerahkan laporannya kepada Kementerian Transmigrasi. Namun, tim tersebut masih memfokuskan kajiannya pada masalah internal yang berkaitan dengan pengaturan internal program transmigrasi. Sementara itu, masalah eksternal yang berkaitan daerah tujuan transmigrasi dan masyarakat aslinya masih tidak tersentuh. Alih-alih mengatasi masalah tersebut, pemerintah malah memindahkan daerah tujuan transmigrasi, dari Pulau Sumatra dan Kalimantan menjadi perbatasan Irian Jaya dan Papua Nugini. Hal tersebutlah yang membuat masalah eksternal tadi menjadi semakin besar. Masalah perusakan lingkungan dan pemindahan masyarakat asli di daerah tujuan transmigrasi mulai mendapat perhatian dunia internasional. Selain timbulnya konflik sosial dan politik, transmigrasi ke Irian Jaya dipandang sebagai program yang tidak realistis dari segi ekonomi.

Namun, ketika harga minyak dunia mengalami keruntuhan pada tahun 1985-1986, program transmigrasi tersebut juga merasakan efeknya. Alokasi dana untuk program transmigrasi mengalami pemotongan sebesar 44% pada tahun 1986/1987 dan 65% pada tahun 1987/1988. Sejak saat itu, program transportasi terus mengalami penurunan. Selain itu, pendapat publik telah sangat terpengaruh oleh kegagalan manajemen yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Pada tahun 1990, hasil sensus menunjukkan bahwa banyak migran dipindahkan ke daerah urban, bukan lagi ke daerah pedalaman. Hal itu juga menunjukkan adanya perubahan dalam program transmigrasi, dari yang semula merupakan transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah menjadi transmigrasi yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Hal ini terjadi pada pertengahan tahun 1980-an ketika banyak pusat pertumbuhan ekonomi berkembang di daerah urban pada pulau-pulau di luar Jawa. Dalam periode ini, para migran juga tertarik pada kesempatan bekerja di negara-negara tetangga, khususnya Malaysia. Hal ini membuat semakin sedikit orang yang tertarik untuk mengikuti program transmigrasi yang diselenggarakan oleh

pemerintah. Pada akhir Repelita V, capaian program transmigrasi lebih rendah dari target pemerintah, bahkan setelah pemerintah menetapkan target yang rendah.

Repelita VI menjadi usaha pemerintah untuk menarik masyarakat kembali dalam mengikuti program transmigrasi. Pada Repelita VI ini, pemerintah menambahkan program pengembalian penduduk hutan lokal kepada lingkungan awalnya ke dalam program transmigrasi. Hal itu dilakukan sebagai usaha pemerintah untuk mendapat “persetujuan” dari dunia internasional yang sempat mengecam program transmigrasi di Indonesia. Masyarakat asli hutan dinilai oleh pemerintah sebagai salah satu masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya transmigrasi, pemerintah berusaha menaikkan standar kehidupan dari masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut. Pemerintah juga berusaha menarik perusahaan swasta untuk ikut bekerja sama dalam program transmigrasi ini. Namun, usaha tersebut gagal karena ketidaksiapan sistem yang ada di dalam Kementerian Transmigrasi.

Program transmigrasi semakin terlihat menuju akhirnya ketika Indonesia didera Krisis Ekonomi pada bulan Agustus tahun 1997. Dengan keadaan ekonomi Indonesia yang semakin memburuk, sangat sulit bagi pemerintah untuk terus menjalankan program transmigrasi tersebut. Setelah Presiden Suharto turun, Wakil Presiden B.J. Habibie masih memiliki itikad baik untuk melanjutkan program transmigrasi tersebut. Namun, rencana tersebut terkendala oleh masalah dana. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Kementerian Transmigrasi dilebur ke dalam Kementerian Kependudukan. Pada periode ini, memindahkan masyarakat ke tempat lain bukan lagi menjadi fokus utama Kementerian Kependudukan. Fokus utama mereka adalah menyelesaikan masalah yang muncul akibat transmigrasi. Salah satu caranya adalah dengan mengembalikan para migran ke daerah asal mereka. Hal ini dilakukan karena munculnya banyak konflik antara penduduk migran dengan penduduk lokal. Hal tersebut menandai berakhirnya perjalanan program transmigrasi di Indonesia.

Transmigrasi dan Konflik

Bab kedua dan ketiga dari bagian pertama buku ini, *Development-Migration-Conflict* dan *Demographic Engineering and Displacement*, memaparkan masalah dan konflik yang muncul sebagai akibat dari transmigrasi di Indonesia. Bab kedua diawali dengan penjelasan akan perkembangan ekonomi dan populasi di Indonesia yang sangat pesat pada masa pemerintahan Orde Baru yang mulai berkuasa pada tahun 1966. Perkembangan ekonomi Indonesia menjadi pesat karena pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama bagi pemerintah Orde Baru. Hal itu terlihat dari dibuatnya banyak rencana pembangunan nasional dan regional. Widjojo Nitisastro sebagai seorang yang dikenal sebagai arsitek ekonomi Indonesia di masa Orde Baru mengatakan bahwa faktor populasi sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah populasi penduduk Indonesia yang telah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan banyaknya-102,9 juta jiwa (sumber: World Bank, United States Census Bureau), Nitisastro mengemukakan bahwa perlu diadakan usaha-usaha pembangunan di Indonesia untuk memperluas kesempatan bekerja yang disertai dengan usaha pengontrolan jumlah penduduk. Akibat dari rencana pembangunan tersebut, pada tahun 1970-an angka pertumbuhan rata-rata perkapita *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia mencapai 5,4%. Angka tersebut mendekati angka yang dicapai oleh Negara Industrial Baru.

Sementara itu, usaha pengontrolan jumlah penduduk dilaksanakan dengan munculnya program Keluarga Berencana yang membatasi sebuah keluarga untuk memiliki dua orang anak saja. Program ini juga dibarengi dengan usaha pemerataan jumlah penduduk dengan cara memindahkan penduduk dari pulau-pulau berpenduduk padat, seperti Pulau Jawa, Bali, dan Madura, ke pulau-pulau lain yang jumlah penduduknya masih relatif “sedikit”, seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Usaha pemerataan jumlah penduduk itu dilaksanakan melalui program transmigrasi.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi Indonesia yang semakin pesat, bidang-bidang lain juga mengalami pertumbuhan, misalnya

bidang sosial dan politis. Semenjak Indonesia merdeka pada bulan Agustus tahun 1945, persatuan nasional selalu menjadi isu utama yang diperhatikan. Hal itu terutama berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada masa Orde Baru, negara Indonesia cenderung berorientasi ke arah negara sentralis. Hal ini bisa dilihat dari terpusatnya kekuatan dan kekuasaan di tangan presiden. Dari sisi kebijakan yang ada, misalnya, hampir 80% belanja publik direncanakan dan didanai oleh dana nasional dan hanya sekitar 20% dana yang tersisa dikelola oleh pemerintah daerah. Hal itu berakibat pada tidak terbatasnya kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kurang bebas. Pertumbuhan ekonomi dan struktural yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut semakin mempertajam karakter negara sentralis di dalam pemerintahan Indonesia. Karakter tersebut pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam penerapan kebijakan pemerintah di daerah.

Sejak tahun 1970, terjadi beberapa perubahan signifikan yang sangat berpengaruh terhadap pengendalian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menjadi semakin luas. Pertama, pemusatan kekuatan di dalam tubuh Angkatan Bersenjata menjadikan kekuasaan pemimpin di daerah semakin berkurang. Kedua, proses depolarisasi telah meminimalisasi kemungkinan perbedaan pendapat dengan pemerintah pusat. Ketiga, pertumbuhan layanan perkapalan dan penerbangan antarpulau, layanan telekomunikasi, perdagangan, dan jaringan perbankan merengkuh daerah-daerah di Indonesia untuk masuk ke dalam satu sistem ekonomi nasional. Keempat, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi faktor pemersatu masyarakat Indonesia yang pada dasarnya merupakan masyarakat etnolinguistik yang plural. Di sini, Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama yang menjembatani perbedaan-perbedaan bahasa daerah yang ada.

Melihat hal itu, muncul beberapa gerakan di daerah yang pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Tercatat ada dua periode penting yang menandai munculnya konflik di daerah tersebut ke permukaan, yaitu pada tahun 1950-an dan tahun 1990-an. Kedua gerakan tersebut memiliki karakter politis dan ideologis

yang berbeda. Gerakan yang terjadi pada tahun 1950-an tidak bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sementara itu, gerakan yang muncul pada tahun 1990-an memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sejak munculnya gerakan pada tahun 1950-an tersebut, isu mempertahankan persatuan Indonesia selalu menjadi perhatian pemerintah.

Pemerintah Orde Baru memandang masalah populasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga persatuan Indonesia. Pemerintah menganggap persebaran penduduk yang tidak merata antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain merupakan masalah populasi utama di Indonesia. Sejak awal berkuasa, Presiden Suharto secara terus menerus menyerukan kebijakan pemerataan populasi penduduk Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk program transmigrasi. Alasan dibalik tindakan Presiden Suharto tersebut ditengarai berangkat dari konsep keselarasan dalam budaya Jawa yang dalam konteks negara Indonesia bisa diartikan sebagai persatuan nasional. Dalam hal ini, transmigrasi dinilai sebagai alat yang dapat mempercepat proses persatuan nasional tersebut.

Proses sosial yang dibentuk oleh perubahan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru tersebut berpengaruh pada munculnya banyak konflik antaranggota masyarakat. Yang menarik dilihat adalah mengapa konflik muncul di suatu daerah, tetapi tidak di daerah lain. Selain itu, mengapa konflik yang ada di suatu daerah tertentu lebih sulit untuk diselesaikan, jika dibandingkan dengan daerah lain. Bab ketiga berusaha menjelaskan alasan utama munculnya pengungsi internal, khususnya berkaitan dengan kebijakan rekayasa demografi yang memindahkan masyarakat dari Pulau Jawa ke pulau lain yang menyebabkan munculnya ketegangan dan konflik antara masyarakat pendatang dan penduduk lokal. Selain itu, perkembangan jumlah pengungsi internal di suatu daerah yang turut mempengaruhi kebijakan otonomi daerah juga dipaparkan di sini.

Kebijakan rekayasa demografis sebetulnya sudah diterapkan sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan mencolok antara rekayasa demografis yang dilakukan oleh Penjajah Belanda dan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Penjajah Belanda hanya

secara tersirat menggunakan kebijakan migrasi sebagai alat dari rekayasa demografis untuk tujuan keamanan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia secara terang-terangan memindahkan penduduk untuk mencapai tujuan politis dan strategisnya. Rekayasa demografis menjadi bagian penting dari kebijakan strategis negara dalam mengurangi kemungkinan timbulnya ketegangan sosial dan politis, baik di Pulau Jawa maupun di pulau lainnya. Kebijakan transmigrasi, bersama dengan strategi militer lainnya, juga digunakan untuk mendukung kebijakan luar negeri ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Hal itu dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perbatasan di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Paling penting, transmigrasi digunakan sebagai alat untuk mengasimilasi kelompok-kelompok etnis yang berbeda dalam membangun identitas budaya yang homogen di bawah sebuah negara-bangsa yang terintegrasi.

Namun, transmigrasi tersebut kemudian menimbulkan konflik di daerah tujuannya. Konflik itu muncul pada dasarnya karena perlakuan “khusus” yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada para migran dan lingkungan tempat tinggal mereka. Pemerintah pusat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembangunan di lingkungan tempat tinggal para transmigran jika dibandingkan dengan anggaran untuk daerah lainnya. Pembangunan jalan, sekolah, kantor pertanian, fasilitas kesehatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya biasanya terpusat hanya di daerah tujuan transmigrasi, dengan sedikit pembangunan di daerah lain.

Sebetulnya, jika diteliti lebih lanjut, konflik yang terjadi antara para migran dengan penduduk lokal bukan hanya disebabkan oleh masalah transmigrasi. Akar dari konflik yang timbul adalah adanya kesenjangan ekonomi dan sosial antara pusat dan daerah. Pusat di sini berarti Pulau Jawa dan Bali, sedangkan daerah di sini adalah pulau lain selain Jawa dan Bali. Kesenjangan ekonomi terlihat jelas dari pembangunan yang hanya dipusatkan di Pulau Jawa dan Bali saja. Sementara itu, pulau-pulau lainnya seolah-olah tidak tersentuh pembangunan sama sekali. Hal itu terutama terlihat di Indonesia Timur. Penduduk lokal di Indonesia Timur, selain mendapat tekanan kuat dalam hal politis dan budaya, kemudian mendapat tekanan lebih lanjut

ketika mereka tersingkir dalam bidang ekonomi ketika para migran berdatangan ke daerah mereka.

Di Indonesia Timur, khususnya Irian Jaya dan Timor Timur, pembagian tenaga kerja berdasarkan kelompok etnis terlihat paling mencolok jika dibandingkan dengan daerah lain. Sektor ekonomi tingkat atas biasanya berada di tangan kelompok etnis Tionghoa, sedangkan sektor menengah dan bawah biasanya didominasi oleh kelompok etnis Makasar, Bugis, dan Buton. Lapangan pekerjaan sebagai pegawai negeri dan anggota militer yang jumlahnya terbatas biasanya dikuasai oleh etnis Jawa dan etnis para migran lainnya. Dominasi kelompok etnis Jawa dalam menduduki jabatan pemerintahan merupakan efek samping dari proses seleksi pegawai negeri yang memang dilakukan di Pulau Jawa. Di Irian Jaya dan Timor Timur, karena adanya latar belakang sejarah politis, penunjukan pegawai pemerintahan oleh pemerintah pusat juga didasarkan pada pertimbangan militer dan keamanan. Kebencian penduduk lokal terhadap dominasi para migran, baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor swasta, terlihat sangat jelas. Di Irian Jaya dan Timor Timur, konflik antara migran dan penduduk lokal yang semula disebabkan oleh alasan ekonomi semata kemudian berkembang lebih lanjut menjadi konflik antaretnis dan antaragama. Sementara itu, konflik antara kelompok etnis Madura dan Dayak di Kalimantan Barat lebih disebabkan oleh kesalahpahaman budaya.

Setelah Presiden Suharto lengser, mulai muncul banyak protes terkait ketidakseimbangan hubungan antara pusat dan daerah. Tercatat, ada beberapa aksi protes yang cukup besar yang menuntut otonomi daerah. Timor Timur, Irian Jaya, dan Aceh merupakan tiga provinsi yang secara tidak resmi mendapat status sebagai Daerah Operasi Militer karena di tiga provinsi ini muncul gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Lebih lanjut, kembali muncul konflik antaretnis pada tahun 1999 yang melibatkan kelompok etnis Melayu dan Madura serta tahun 2001 yang melibatkan kelompok etnis Madura dan Dayak Sampit. Pada tahun 1999, juga terjadi konflik di Ambon antara penduduk lokal yang beragama Kristen dan migran dari etnis Buton yang beragama Islam. Runtutan konflik yang melibatkan unsur separatisme, etnisitas, dan agama tersebut merupakan tantangan bagi

kedaulatan nasional dan konsep negara-bangsa di Indonesia.

Lengsernya Presiden Suharto menandai berakhirnya era Orde Baru. Usaha Orde Baru untuk memaksakan peleburan aspirasi dari banyak kelompok etnis sebagai fondasi dasar ekonomi Indonesia juga tidak bisa dilanjutkan. Hal itu kemudian juga membuat munculnya berbagai konflik laten yang selama ini ditekan oleh Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru juga memunculkan kebingungan dan disorientasi kepada para kepala daerah yang menjadikan mereka menganggap bahwa masa depan daerahnya sekarang sepenuhnya berada di tangan mereka. Pada saat itulah, wacana tentang otonomi daerah menguat, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati.

Politik Perubahan tanpa Perubahan dalam Politik

Setelah Orde Baru runtuh, Indonesia memasuki masa yang disebut sebagai masa reformasi. Di masa reformasi ini muncul antusiasme untuk mencabut konsep sentralisasi yang ada selama masa Orde Baru yang lalu. Desentralisasi dan otonomi daerah dengan cepat menjadi dua agenda penting nasional. Masa reformasi ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, adanya keinginan kuat untuk membentuk ulang sistem politik Indonesia, terutama melalui amandemen konstitusi. Kebuntuan politis yang terjadi selama Orde Baru kemudian diubah secara drastis. Hal ini merupakan yang pertama kalinya semenjak kemerdekaan Indonesia. Beberapa perubahan dilakukan, misalnya restrukturisasi posisi lembaga-lembaga besar negara, seperti parlemen, kepresidenan, dan pemilihan umum. Kedua, adanya dorongan kuat untuk secara geografis mendistribusikan kekuasaan pusat ke masing-masing daerah.

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, telah dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk merancang undang-undang otonomi daerah tersebut. Kegagalan Presiden Habibie mencegah merdekanya Timor-Timur pada bulan Agustus tahun 1999 kemudian menjadi dorongan utama dikeluarkannya dua buah undang-undang yang mengatur tentang desentralisasi dan posisi pemerintah daerah versus pemerintah pusat. Dua

undang-undang itu adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Keseimbangan Finansial antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut menggantikan undang-undang tentang pemerintah daerah sebelumnya, Undang-Undang No.2 Tahun 1974, dan undang-undang tentang pemerintah desa, Undang-Undang No.5 Tahun 1979. Kedua undang-undang baru tersebut diharapkan dapat membawa perubahan baik dari sistem politik sebelumnya yang sangat terpusat.

Namun, pada kenyataannya, penerapan kedua undang-undang tersebut di tingkat daerah tidak terlepas dari berbagai masalah. Masalah yang paling utama adalah interpretasi masing-masing pemerintah daerah atas undang-undang tersebut yang berbeda-beda dan tidak jarang kebablasan. Akibatnya pemerintah daerah menjadi raja-raja kecil di daerahnya dan secara bebas dan tidak terkontrol mengeksploitasi sumber daya, terutama sumber daya alam, di daerah kekuasaannya. Selain itu, muncul pula sentimen kedaerahan yang sangat tinggi, terutama dalam proses rekrutmen pegawai pemerintahan. Putra daerah harus diberi prioritas pertama, di atas orang-orang yang berasal dari daerah lain. Hal itu tentu sangat tidak menguntungkan bagi calon pegawai yang tidak berasal dari daerah tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2004, di bawah pemerintahan Presiden Megawati, dikeluarkanlah revisi dari undang-undang tahun 1999 tersebut, yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004.

Lebih lanjut, motivasi elit politik di tingkat daerah untuk membentuk provinsi atau kabupaten baru sangatlah beragam; mulai dari ambisi pribadi untuk memperoleh posisi birokratis dan politis sampai keinginan untuk membangun masyarakat modern di daerah. Dalam mewujudkan tujuan mereka tersebut, etnisitas, selain memberikan ruang yang dapat dimanipulasi untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat, pada waktu yang sama, juga menjadi media legitimasi kebudayaan untuk membenarkan motivasi mereka tersebut. Dalam lingkup politis itu, etnisitas digunakan sebagai alasan jangka pendek oleh para elit politik lokal dan juga penguasa ekonomi. Sentimen terhadap lokalitas atau identitas kelompok atau sejarah lokal tertentu—atau

gabungan dari semuanya—dianggap sebagai alat yang bisa digunakan dalam panggung politis.

Hal itulah yang kemudian menciptakan munculnya jurang dalam politik Indonesia saat ini. Harapan akan adanya perubahan politis dan demokratisasi dengan penerapan reformasi politik menjadi tidak terwujud. Alih-alih, saat ini kita menyaksikan peristiwa-peristiwa politis yang mengular dan mengarah pada proses involusi. Istilah tersebut meminjam dari konsep “involusi agrikultural” oleh Clifford Geertz (1971) yang memaparkan tentang proses bertambahnya kompleksitas internal pada struktur praktik politik di Indonesia yang tanpa adanya perubahan berarti pada substansinya. Ignas Kleden (2005) juga mengatakan hal yang serupa—keadaan Indonesia saat ini sebagai “politik perubahan tanpa perubahan politik”.

Kegagalan Proyek Pembangunan Bangsa

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia sejak dahulu telah menjadi perhatian oleh pemerintah. Hal itu kemudian yang menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan demografis berupa program transmigrasi. Program transmigrasi tersebut digadang-gadang sebagai salah satu unsur utama dalam proyek pembangunan negara-bangsa Indonesia. Tujuan kebijakan transmigrasi yang bersegi banyak itu membuatnya memiliki fleksibilitas yang tinggi yang mengizinkan pemerintah untuk “membentuk” arah kebijakan itu sesuai dengan minat politik dan ekonomi mereka. Politisasi dari program transmigrasi dan dominasi etnis Jawa menjadi faktor utama adanya perbedaan perlakuan terhadap etnis lain di daerah tujuan transmigrasi. Pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Suharto melakukan rekayasa demografis dengan program “jawanisasi” yang ada di balik transmigrasi. Situasi tersebut menunjukkan sempitnya pemahaman Pemerintah era Orde Baru tentang nasionalisme.

Garis batas yang semakin tampak nyata memisahkan etnis-etnis di Indonesia pada pemerintahan Presiden Suharto merupakan salah satu konsekuensi yang muncul secara tidak sengaja dan berasal dari beberapa faktor, bukan hanya akibat dari program transmigrasi yang bias etnis saja. Perubahan struktural yang mengarah pada perkembangan yang tidak seimbang, baik

antardaerah maupun antarkelas sosial, menumbuhkan perasaan ketidaksetaraan yang muncul dengan kuat di antara etnis-etnis di Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan munculnya ketegangan sosial dan komunal. Lebih lanjut, runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Suharto telah memunculkan dinamika baru yang membuat masalah-masalah lokal mengemuka ke atas dan, pada beberapa kasus, berubah menjadi konflik komunal yang brutal. Selain itu, jaringan terorisme nasional dan internasional juga turut terungkap.

Mengemukanya masalah-masalah tersebut mau tidak mau mengubah wajah nasionalisme di masa sekarang. Saat ini, nasionalisme tidak lagi dipandang dalam lingkup yang sama seperti di masa para proklamator mencetuskan kemerdekaan Indonesia. Disintegrasi di Indonesia masih akan menjadi ancaman selama para pemimpin bangsa saat ini—dan di masa depan—belum mampu membuang obsesi mereka terhadap Indonesia sebagai sebuah wilayah geografis saja dan tanpa mempertimbangkan masyarakat di dalamnya. Ancaman yang selama ini ada merupakan ancaman yang berasal dari dalam konfigurasi demografis Indonesia saja.

Sementara itu, di era politik global sekarang ini, ancaman-ancaman baru akan tidak mudah diredam oleh batasan-batasan kedaulatan yang ada. Kesadaran akan kewarganegaraan global—yang telah diadopsi oleh berbagai tokoh nonnegara internasional dan transnasional yang mempercayai bahwa hak asasi manusia dapat memunculkan tantangan baru bagi pemerintah saat ini—sayangnya, masih berkembang dan beroperasi di bawah prinsip-prinsip konvensional kedaulatan negara-bangsa. Dalam hal ini, kegagalan Indonesia dalam mempertahankan Timor Timur merupakan salah satu contoh kasus yang merefleksikan hal tersebut. Meskipun kasus Timor Timur berbeda dengan kasus Aceh dan Papua, dalam situasi internasional yang mendukung penyelesaian masalah kedaulatan dengan cara mengadakan negoisasi konsensus politis saat ini, klaim suatu negara atas batas kedaulatan geografis sudah tidak lagi mencukupi. Dalam perspektif ini, tantangan yang dihadapi pemimpin Indonesia dalam menyelesaikan proyek nasionalis warisan para Proklamator perlu dinilai kembali—atau lebih tepatnya diformulasikan

kembali—terutama tentang gagasan dasar dari nasionalisme itu sendiri.

Perpindahan Penduduk Antarnegara dan Permasalahannya

Pada bagian kedua buku ini, penulis keluar dari konteks Indonesia dan melihat perpindahan penduduk antarnegara dan masalah-masalah yang menyertainya. Di sini penulis memfokuskan tulisannya dalam menyoroiti masalah perpindahan penduduk yang terjadi di kawasan Asia Timur. Asia Timur di sini meliputi Australia, negara-negara di Asia Tenggara, Cina, dan Korea Utara.

Bab ketujuh buku ini, yang berjudul *Malay World and the Politics of Space*, membahas masalah perpindahan penduduk yang terjadi di wilayah Alam Melayu (*Malay World*). Alam Melayu menunjuk pada wilayah di Asia Tenggara yang meliputi Malaysia, Indonesia, Brunai, Thailand, dan Singapura. Negara-negara tersebut pada masa lalu merupakan negara-negara yang memiliki hubungan dagang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*. Di masa sekarang, batasan negara-negara di Alam Melayu tersebut semakin mengabur. Saat ini, yang menjadi fokus bukan lagi “Melayu” dan “Non-Melayu”. Munculnya banyak aktivitas transnasional, yang mengiringi globalisasi, memunculkan pula gejala perubahan sosial yang mengarah pada inklusivitas dan pluralitas di dalam masyarakat.

Selanjutnya, pada bab delapan, *Cross-Border Migration and the Nunukan Tragedy*, penulis menggambarkan masalah-masalah yang muncul akibat adanya perpindahan penduduk antarnegara tersebut. Dalam hal ini, penulis membahas masalah yang terjadi akibat perpindahan penduduk dari Indonesia ke Malaysia. Sejak adanya perkembangan ekonomi yang pesat di Malaysia pada tahun 1970an, banyak masyarakat Indonesia yang mencari pekerjaan di sana. Pekerjaan yang tersedia biasanya adalah pekerjaan tingkat rendah dan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Sebagian besar dari orang-orang yang pergi mencari pekerjaan di Malaysia tersebut berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Masalah kemudian muncul karena banyak dari orang-orang tersebut yang menggunakan cara

yang ilegal untuk masuk ke Malaysia. Pemerintah Malaysia sudah melihat dan memperhatikan masalah tersebut sejak tahun 1984. Namun, baru pada tahun 2002, pemerintah Malaysia melakukan tindakan tegas dalam menghadapi masalah migran ilegal dari Indonesia tersebut. Pemerintah Malaysia memberikan denda dan mendeportasi para pekerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi. Untuk menghindari deportasi tersebut, para pekerja ilegal tersebut berusaha melarikan diri dari Malaysia melalui pintu-pintu masuk Indonesia-Malaysia yang ada. Salah satu pintu masuk Indonesia-Malaysia yang diserbu oleh pekerja ilegal Indonesia yang dideportasi oleh Malaysia itu adalah Pulau Nunukan. Pulau Nunukan kemudian menjadi semacam tempat penampungan bagi para pekerja ilegal Indonesia yang dideportasi tersebut.

Dengan bertambahnya jumlah pekerja ilegal Indonesia yang datang mengungsi dan terbatasnya fasilitas yang ada di Pulau Nunukan, banyak dari pengungsi tersebut yang jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sampai tanggal 5 September 2002, dilaporkan sebanyak 70 orang pengungsi yang merupakan pekerja ilegal Indonesia meninggal di sana. Tentu saja setelah kejadian itu pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Megawati melakukan usaha-usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, tragedi tersebut menjadi titik tolak mengemukanya isu perpindahan penduduk antarnegara di mata dunia internasional.

Pada bab selanjutnya, *In the Margin of a Borderland: Florenese Community in Sabah*, penulis memunculkan isu marjinalisasi kelompok pekerja dari etnis Flores yang ada di Pulau Nunukan dan Pulau Tawau. Pulau Nunukan masuk ke dalam wilayah Indonesia, sementara Pulau Tawau masuk ke dalam wilayah Malaysia. Kedua pulau ini dipisahkan oleh batas laut internasional yang dapat ditempuh dengan menggunakan *speedboat* selama 90 menit. Proses perpindahan penduduk dari Flores Timur ke Pulau Nunukan dan Tawau sebetulnya sudah berlangsung sejak sebelum tahun 1950. Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Malaysia pada tahun 1970an menjadi faktor pemicu bertambahnya jumlah orang Flores yang datang ke Malaysia. Para pekerja dari Flores yang datang ke Malaysia tersebut, jika beruntung memperoleh pekerjaan

yang tetap, kebanyakan tinggal di Sabah. Sementara itu, bagi para pekerja yang kurang beruntung dan hanya memperoleh pekerjaan kelas bawah, kebanyakan tinggal di Pulau Nunukan dan Tawau.

Pada bab ini, penulis memaparkan bagaimana posisi para pekerja dari Flores ini di lingkungan migran di Pulau Nunukan dan Tawau. Orang Flores di kedua pulau tersebut dapat dikatakan merupakan masyarakat marjinal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mereka merupakan migran yang berasal dari kaum minoritas, baik dalam hal etnis maupun agama. Kedua, mereka merupakan pekerja yang berada dalam strata sosial paling rendah, yaitu sebagai pekerja di perkebunan, dengan gaji yang relatif rendah pula. Ketiga, sebagai kelompok minoritas transnasional, kewarganegaraan mereka ditolak dan mereka didiskriminasi oleh negara tujuan dan juga oleh migran dari kelompok etnis dominan.

Kelompok etnis Flores di Pulau Nunukan dan Tawau tersebut masih menjaga komunikasi dengan orang-orang dari tempat asal mereka di Flores Timur. Hal ini dilakukan sebagai salah satu jalan dalam menjaga adat istiadat dan budaya mereka. Masyarakat Flores di kedua pulau itu masih menggunakan bahasa Flores untuk berkomunikasi antaranggota kelompoknya. Mereka juga masih memegang agama asal mereka, yaitu Katolik. Dalam menghadapi kerasnya kehidupan sebagai masyarakat marjinal di kedua pulau ini, gereja berperan sangat besar dalam membantu meringankan beban orang-orang Flores tersebut.

Pada bab ini, penulis menyoroti kurangnya kajian yang dilakukan pada komunitas perbatasan transnasional. Kebanyakan kajian yang sudah ada pun masih belum memiliki kerangka teori dan alat analisis yang kuat. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya kajian lebih lanjut pada komunitas-komunitas transnasional seperti komunitas Flores di Pulau Nunukan dan Tawau ini.

Bab sepuluh buku ini, *The Making of Minahasan Community in Oarai, Japan*, memaparkan komunitas pekerja Minahasa di Kota Oarai, Prefektur Ibaraki, Jepang. Sama seperti kasus pekerja dari suku Flores di Pulau Nunukan dan Tawau, orang-orang Minahasa datang ke Oarai untuk mencari pekerjaan. Kedua kelompok

tersebut menggunakan rantai keluarga dalam mencari dan memperoleh kesempatan kerja di negara tujuan. Selain itu, peran anggota komunitas dan gereja juga memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, terdapat satu perbedaan di antara pekerja dari Flores dengan pekerja dari Minahasa ini. Jika orang-orang Flores yang pergi mencari pekerjaan ke Malaysia merupakan masyarakat miskin, orang-orang Minahasa yang pergi ke Oarai bukanlah berasal dari kalangan masyarakat miskin. Hal itu disebabkan biaya untuk pergi ke Oarai sangatlah mahal. Butuh sekitar 40- 45 juta bagi seseorang yang ingin pergi dari Minahasa ke Oarai. Uang sejumlah itu dipakai untuk membeli tiket dan membayar biaya administrasi.

Para pekerja Minahasa ini mulai datang ke Oarai pada tahun 1980-an. Mereka kebanyakan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang makanan laut. Pemilik perusahaan tempat mereka bekerja puas dengan hasil kerja mereka sehingga pemilik perusahaan meminta mereka untuk mengajak saudara atau kenalan mereka untuk bekerja juga di perusahaan itu. Pada awalnya, hal ini berjalan dengan baik. Namun, sejak pemerintah Jepang memberlakukan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru pada tahun 1990-an, keberadaan pekerja asing, terutama yang ilegal, dikontrol dengan sangat ketat.

Sejak adanya kontrol yang ketat dari pemerintah tersebut, dan juga dengan masuknya banyak pekerja dari Cina, posisi pekerja dari Minahasa tersebut mulai goyah. Mereka harus mencari pekerjaan di tempat lain selain Oarai karena kesempatan kerja di sana tidak sebanyak dahulu. Hal inilah yang membuat ikatan di antara pekerja dari Minahasa tersebut semakin melemah. Selain itu, peran keluarga, kerukunan, dan gereja dalam kehidupan sosial para pekerja Minahasa juga turut melemah.

Dalam dua bab terakhir buku ini, penulis berusaha menarik semacam garis merah yang menghubungkan semua hal yang berputar di sekeliling perpindahan penduduk, terutama di kawasan Asia Tenggara. Pada bab sebelas, *Migration, Ethnicity, and Conflict in Southeast Asia*, penulis ingin mencari hubungan antara populasi penduduk, etnisitas, dan konflik dengan mengambil contoh pada situasi di Asia, khususnya

Asia Tenggara. Pertambahan penduduk yang cepat ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya konflik di suatu negara, terutama di negara miskin dan negara berkembang. Banyaknya jumlah penduduk miskin di negara-negara tersebut membuat mereka berusaha mencari pekerjaan di luar negaranya. Namun, jika melihat kasus Asia Tenggara, perpindahan penduduk antarnegara tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Orang-orang Vietnam, misalnya, berusaha pergi dari negaranya menuju negara-negara tetangga karena adanya Perang Vietnam. Kedatangan para pengungsi dari Vietnam ke negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand tersebut kemudian menimbulkan berbagai masalah di negara tujuan.

Selain masalah ekonomi dan menghindari keadaan darurat perang tersebut, konflik antaretnis juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Hal itu seperti terlihat pada kasus pengungsi Rohingya yang terpaksa pergi dari negaranya, Myanmar, dan mencari bantuan ke negara-negara tetangga. Selain itu, banyak lagi contoh konflik etnis di negara-negara Asia Tenggara yang menyebabkan munculnya gerakan perpindahan penduduk ke negara lain. Hal itu tentu saja menjadi cermin kegagalan negara-negara Asia Tenggara dalam menangani masalah politik domestik dan masalah antardaerah mereka, khususnya di bidang perpindahan penduduk. Daerah-daerah perbatasan di negara-negara Asia Tenggara saat ini dianggap sebagai representasi dari daerah tujuan pemindahan penduduk secara paksa yang memunculkan berbagai masalah. Beberapa masalah yang mengemuka berkaitan dengan perpindahan penduduk tersebut antara lain, status tanpa negara seorang migran, status kewarganegaraan para migran yang tidak jelas, perdagangan manusia, serta politik identitas. Masalah-masalah tersebut membuat Asia Tenggara menjadi lapangan penelitian yang kompleks dan menarik untuk diteliti lebih mendalam, khususnya penelitian di bidang populasi penduduk, etnisitas, dan konflik.

Pada bab terakhir buku ini, *Migration—Development—Security Nexus: In Search of New Perspective in the Changing East Asian Contexts*, penulis mengangkat masalah keterkaitan antara perpindahan penduduk, perkembangan suatu

negara—baik negara yang ditinggalkan maupun yang didatangi oleh para migran—dan masalah keamanan, baik keamanan fisik maupun mental. Masalah keamanan menjadi faktor utama yang mendorong munculnya dua masalah lain tersebut. Perpindahan penduduk dipicu oleh kebutuhan seorang individu untuk memperoleh rasa aman, baik fisik maupun mental. Ketika perpindahan penduduk itu dilakukan oleh sekelompok orang, terutama perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, tidak dipungkiri menimbulkan masalah keamanan di negara tujuan. Masalah keamanan yang timbul tersebut pada akhirnya akan mengganggu perkembangan negara tujuan migran. Padahal, perkembangan negara juga merupakan salah satu tujuan utama suatu negara dalam mencapai keamanan politis.

Melihat perkembangan yang ada saat ini, perpindahan penduduk antarnegara merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Di sini penulis mengusulkan adanya kajian mendalam terkait perpindahan penduduk antarnegara tersebut. Ada tiga pertanyaan utama yang menurut penulis bisa dikembangkan dalam kajian-kajian lanjutan tentang perpindahan penduduk antarnegara tersebut. *Pertama*, bagaimana cara meminimalisasi efek dari kebijakan rekayasa demografis yang mengatasmamakan pembangunan negara yang sampai saat ini masih diterapkan di negara-negara di Asia Timur? *Kedua*, bagaimana masalah longgarnya perbatasan negara bisa diatasi dalam rangka mengurangi perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang di banyak negara di Asia Timur? *Ketiga*, bagaimana cara meminimalisasi konflik antaretnis, agama, dan batasan kultural lainnya dalam perpindahan penduduk transnasional dan antarnegara, karena konflik-konflik tersebut kemudian menciptakan ancaman keamanan, baik bagi para migran maupun bagi masyarakat pada umumnya?

Penutup

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Riwanto Tirtosudarmo berdasarkan rangkaian penelitiannya selama kurang lebih 30 tahun. Buku ini memberikan pandangan baru dalam melihat masalah perpindahan penduduk. Selama ini, masalah perpindahan penduduk hanya menjadi kajian yang dilakukan oleh peneliti dan ahli di bidang kependudukan. Buku ini membuktikan

bahwa masalah perpindahan penduduk juga bisa, dan perlu, dilihat dari sudut pandang keilmuan lain, misalnya politik. Buku ini memaparkan rangkaian masalah yang muncul seputar perpindahan penduduk, baik masalah yang muncul dalam prosesnya maupun masalah yang muncul karenanya. Buku ini tidak hanya memaparkan masalah seputar perpindahan penduduk di Indonesia, tetapi juga melihat masalah-masalah yang muncul di beberapa negara, khususnya di Asia Tenggara.

Selain membaca buku ini, pembaca dapat membaca buku-buku karya penulis yang lain, seperti *Mencari Indonesia 1*, *Mencari Indonesia 2*, *Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan – Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah)*, dan *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia*. Dengan membaca buku-buku tersebut, pembaca bisa lebih mudah mengikuti dan memahami isu-isu yang diangkat dalam buku ini.

Selain itu, pembacaan buku ini perlu diimbangi dengan pemahaman teori-teori “dasar” maupun studi kasus lain seputar migrasi penduduk, baik di dunia maupun di Indonesia, misalnya *Migration Theory* karya Bertell dan Hollified (2000), serta buku yang mengangkat topik politik, misalnya *Politics and Policy Implementation in the Third World* karya Grindle (1980). Hal tersebut akan membantu pembaca memahami konsep politik migrasi yang menjadi fokus penulis. Meskipun alur pikiran utama penulis telah dipaparkan dengan runut, di dalam tiap-tiap bab penulis memaparkan ide-idenya dengan berlompatan. Kejadian-kejadian penting di dalam buku ini muncul secara tidak berurutan karena mengikuti alur pembahasan penulis. Dengan semakin bertambahnya pengetahuan pembaca tentang topik politik migrasi, pemahaman pembaca terhadap buku ini juga akan semakin dalam. Setiap kali membaca ulang buku ini, pembaca akan menemukan hal-hal baru yang sebelumnya mungkin belum terlihat.

Daftar Pustaka

Bertell, C.B. & Hollified, J.F. (ed). 2000. *Migration Theory: Talking Across Disciplines*. New York and London: Routledge.

Bruner, E.M. 1974. Dalam *Urban Ethnicity*, Abner Cohen (ed). London: Tavistock Publication Series: ASA Monographs/ Association of Social Anthropologists of the Commonwealth, No. 12.

Geertz, C. 1971. *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.

Grindle, M. (ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

Kleden, I. 13 Februari 2005. “Politik Perubahan tanpa Perubahan Politik”. Tempo.

Tirtosudarmo, Riwanto & John Haba (ed). 2005. *Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan – Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LIPI Press.

_____. 2010. *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial*. Jakarta: LIPI Press.

_____. 2013. *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.